



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA MADIUN**

☎ (0351) 455 855
📍 Jl. Tirta Raya Nomor 15, Kota Madiun
🌐 disperta.madiunkota.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai visi dan misi yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam kurun waktu tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Laporan ini memuat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024, perbandingan capaian dengan tahun lalu dan perbandingan dengan target RPJMD. Selain itu dalam laporan ini, dijelaskan pula realisasi anggaran pada tahun 2024 serta tingkat efisiensi pencapaian kinerja.

Tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2024 berorientasi pada pencapaian Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun **"Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mandiri"**, dan akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja dinas kami pada tahun-tahun mendatang.

Madiun, 7 Maret 2025

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA MADIUN**



TOTOK SUGIARTO, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700901 199603 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Gambaran Umum Organisasi	4
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	7
1.5 Isu Gender	8
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Kinerja	9
2.2 Indikator Kinerja Utama	13
2.3 Perjanjian Kinerja	14
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.1.1 Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	17
3.1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	22
3.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Petani	27
3.1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	31
3.1.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	35
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
3.1.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	40
3.1.8 Hasil Pelaksanaan Gender Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	49
3.2 Realisasi Anggaran	52
BAB IV	53
PENUTUP	53
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun	6
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Gol.Ruang	6
Tabel 1. 3 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun	7
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024	13
Tabel 2. 3 Sasaran Kinerja, Indikator dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 2. 4 Program dan Anggaran Tahun 2024.....	15
Tabel 3. 1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran	16
Tabel 3. 2 Skor PPH Kota Madiun tahun 2024.....	18
Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Skor PPH Tahun 2024	19
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Skor PPH Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	21
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Skor PPH Kota Madiun, Provinsi dan Nasional	21
Tabel 3. 6 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2024.....	23
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	25
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi Kota Madiun, Provinsi dan Nasional	26
Tabel 3. 9 Perbandingan antara Realisasi dan Target Indikator Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi Tahun 2024.....	28
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	29
Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi Kota Madiun, Provinsi dan Nasional.....	30
Tabel 3. 12 Perbandingan antara Realisasi dan Target Indikator Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi Tahun 2024	32
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	33
Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi Kota Madiun, Provinsi dan Nasional.....	34

Tabel 3. 15 Perbandingan antara Realisasi dan Target Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024	36
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	37
Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Provinsi dan Nasional	38
Tabel 3. 18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
Tabel 3. 19 Realisasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024	50
Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Tahun 2024	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun	5
Gambar 3. 1 Capaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021-2024.....	20
Gambar 3. 2 Capaian Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi Tahun 2021-2024	24
Gambar 3. 3 Capaian Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi Tahun 2021-2024 ..	28
Gambar 3. 4 Capaian Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi Tahun 2021-2024	33
Gambar 3. 5 Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2024	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Terdapat Enam indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Madiun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2019-2024 serta program prioritas Pemerintah Kota Madiun yang lainnya. Dari Enam indikator semua masuk ke dalam kriteria di atas ekspektasi karena memiliki nilai kinerja di atas 100 persen. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)
1	Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri		Indeks Ketahanan Pangan	81.04	92.29	113.9
2		Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95.8	95	99.2
3		Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1.35	1.35	100
4		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1.16	1.2	103.4
5		Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1.221	1.26	103.2
6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.48	4.68	104.5

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik yang disebut *good governance*. *Good governance* bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, serta cita-cita bangsa dan negara serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Agar terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sistem pemerintahan yang baik hendaknya dapat memenuhi beberapa kriteria, salah satunya dapat melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dengan demikian, setiap instansi pemerintah wajib melaporkan dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang disinkronkan dengan dokumen review Renstra serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang memuat capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diampu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2024 merupakan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan DPA APBD TA.2024 dan DPPA P-APBD TA. 2024, yang penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2019-2024, Review Renstra 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun Anggaran 2024. LKjIP ini memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun selama Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Madiun pada tahun 2024 dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun di masa yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2024, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah no 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

• Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan, serta bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang perikanan;
4. Pelaksanaan pembinaan UPTD;
5. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

• Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dipimpin oleh pejabat eselon II yaitu kepala dinas yang dibantu oleh empat pejabat eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Pertanian, dan Kepala Bidang Perikanan. Sekretariat terdiri dari 1 Kepala Sub Bagian, sedangkan masing-masing bidang terdiri dari Sub koordinator. Adapun bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun



• Sumber Daya

Dalam gambaran umum sumber daya yang digambarkan adalah meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, dapat digambarkan sumber daya manusia sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah pejabat struktural yang terisi sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota

Madiun sebanyak 6 orang pejabat. Jumlah pegawai sebagai unsur pelaksana tugas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun 76 orang.

Struktural	: 6 orang
Fungsional	: 14 orang
Pelaksana	: 6 orang
Tenaga HR/Kontrak	: 5 orang
Tenaga Upahan	: 44 orang
THL / TB	: 1 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	3 orang
4	Kasubag	1 orang
5	Ka UPTD RPH	-
6	Kasubag TU UPTD RPH	-
8	Fungsional	14 orang
7	Pelaksana	7 orang
9	Tenaga Kontrak	5 orang
10	Tenaga Upahan	44 orang
11	THL /TB	1 orang
	Jumlah	76 orang

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Gol.Ruang

Berdasarkan Kelamin		Berdasarkan Pendidikan		Berdasarkan Gol. Ruang		Berdasarkan Jabatan Struktural		Tenaga Non ASN	
Laki-laki	50 orang	SD	2 orang	I	0 orang	Es IV/b	0 orang	Pemkot	5 orang
Perempuan	27 orang	SMP	0 orang	II	6 orang	Es IV/a	1 orang	Pusat	1 orang
		SMA	33 orang	III	14 orang	Es III/b	3 orang	Upahan	44 orang
		D3	5 orang	IV	7 orang	Es III/a	1 orang		
		S1	35 orang			Es II/b	1 orang		
		S2	2 orang						
Jumlah	77 orang	Jumlah	77 orang	Jumlah	27 orang	Jumlah	6 orang	Jumlah	46 orang

Dari tabel diatas dapat diketahui mayoritas SDM di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah lulusan Sarjana (S1) dan yang berada pada

golongan III. Secara kuantitas SDM relatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan tupoksi yang melekat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Tabel 1. 3 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
1	Urusan Pangan	Diversifikasi sumber pangan lokal relatif masih terbatas	Penerapan konsumsi pangan secara Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman belum optimal
		Akses pangan terhadap masyarakat belum optimal	
		Belum optimalnya pengelolaan (produksi, uji produk, peningkatan pengetahuan masyarakat, sertifikasi, izin edar) keamanan pangan.	
		Belum efektifnya sosialisasi dan informasi penerapan Konsumsi pangan Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA)	
2	Urusan Perikanan	Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Kota Madiun	Pendapatan pelaku usaha perikanan belum optimal
		Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan	
		Keuntungan pembudidaya ikan rendah	
		Produksi Perikanan Budidaya belum Optimal	
		Sumberdaya ikan di perairan umum darat semakin berkurang	
		Angka Konsumsi Ikan belum Optimal	
		Belum aktifnya sosialisasi dan informasi peningkatan konsumsi ikan	
		Sarana yang dimiliki pemasar ikan belum optimal	
3	Urusan Pertanian	Pertambahan populasi ternak belum optimal	Pendapatan Petani dan Pelaku Usaha Peternakan Belum Optimal
		Tingginya Biaya Produksi Pertanian	
		Nilai jual produk pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura belum kompetitif	

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		Ketersediaan prasarana pertanian yang belum optimal	
		Faktor Penyebab Gagal Panen Beragam	
		Diseminasi informasi dan teknologi pertanian yang belum optimal	
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Belum Optimal	
		Nilai tambah produk bahan pangan asal hewan yang masih belum maksimal	
		Nilai tambah produk olahan asal hewan yang masih belum maksimal	
		Diseminasi informasi dan teknologi peternakan yang belum optimal	
		Rumah Potong Hewan (RPH) yang belum memenuhi standar teknis	
		Mitigasi Faktor Penyebab Gagal Panen Belum Optimal	

1.5 Isu Gender

Sektor Ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun, di dalam pengelolaan sektor ini, terdapat tantangan gender yang perlu mendapat perhatian serius. Perempuan memainkan peran krusial dalam ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, baik sebagai petani, peternak, nelayan, maupun pengelola pangan rumah tangga. Meskipun demikian, mereka masih menghadapi berbagai hambatan dalam akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan ekonomi. Berikut ini adalah beberapa isu gender yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun :

1. Dalam kelompok tani, perikanan atau peternakan, perempuan sering kali hanya berperan sebagai anggota tanpa keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan.
2. Program Pelatihan sering kali lebih banyak menyasar laki-laki, sehingga perempuan kurang mendapatkan pengetahuan tentang teknologi baru dan praktik pertanian berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan merupakan tahap awal yang krusial dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan harus mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) agar strategi yang disusun dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Perencanaan tidak hanya mencakup penetapan tujuan dan sasaran, tetapi juga merumuskan strategi implementasi dengan mengantisipasi dinamika perubahan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kebijakan yang dapat mempengaruhi pencapaian target organisasi. Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Visi Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah:

"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera."

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun** memiliki peran strategis dalam mendukung visi tersebut dengan fokus pada pencapaian sasaran prioritas kota, yaitu:

- S2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- S10. Pengurangan Kemiskinan

Dalam mendukung Visi dan Misi Kota Madiun Tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun memiliki Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Tujuan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Madiun adalah **"Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mandiri"**. Tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menciptakan sistem ketahanan

pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya eksternal.

2. Sasaran

Sasaran Perangkat Daerah Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Madiun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat
2. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan
3. Meningkatnya kesejahteraan petani
4. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha peternakan
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

VISI KOTA MADIUN	TUJUAN DKPP	SASARAN KOTA	SASARAN DKPP	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri			Indeks Ketahanan Pangan	80,64	80,74	80,84	80,94	81,04
		S2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18,31	18,31	18,31	-	-
				Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	80.1	-
				Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	4.48
		S10. Pengurangan Kemiskinan	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,5	95,6	95,8	95,8

VISI KOTA MADIUN	TUJUAN DKPP	SASARAN KOTA	SASARAN DKPP	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2020	2021	2022	2023	2024
			Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha)	6,9 ton/ha	7,21 ton/ha	7 ton/ha	-	-
				Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,1	1,1	1,12	1,14	1,16
			Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,2	1,21	1,214	1,216	1,221
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18,31	18,31	18,31	-	-
				Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	80.1	80.1

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan penerapan konsumsi pangan secara B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman);
- Meningkatkan Inovasi sistem pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan (teknologi produksi, pengolahan, UPJA/Unit Pelayanan

Jasa Alat Mesin Pertanian dan pemasaran);

- c. Meningkatkan inovasi sistem perikanan (teknologi produksi, pengolahan, dan pemasaran) belum optimal.

Adapun arah kebijakan yang dilaksanakan untuk mendukung strategi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penerapan konsumsi pangan secara B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman) di semua kelurahan
- b. Peningkatan peran masyarakat dalam P2L tingkat RW
- c. Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan menu pangan untuk balita stunting, ibu hamil dan lansia
- d. Peningkatan SDM masyarakat terkait skor pola Pangan Harapan
- e. Peningkatan pembinaan struktur SDM kelompok tani
- f. Peningkatan peran masyarakat dalam inovasi pertanian urban terintegrasi yang ramah lingkungan
- g. Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan produk hasil pertanian dan peternakan
- h. Peningkatan peran masyarakat dalam ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
- i. Fasilitasi pemanfaatan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian untuk kelompok tani
- j. Fasilitasi pemberian subsidi pupuk bagi kelompok tani
- k. Peningkatan peran masyarakat melalui sosialisasi penanganan limbah pertanian dan peternakan
- l. Pemberian kontribusi untuk pengendalian angka stunting kota madiun dari bahan makan pokoknya
- m. Fasilitasi pembiayaan premi Asuransi Usaha Tani
- n. Menekan penularan penyakit hewan zoonosis (rabies)
- o. Peningkatan SDM masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundangan terkait pertanian, peternakan dan kesehatan hewan
- p. Peningkatan pembinaan kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan

- q. Peningkatan peran masyarakat dalam konsumsi ikan
- r. Peningkatan peran masyarakat dalam produksi benih ikan
- s. Pengembangan SDM masyarakat dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- t. Peningkatan SDM masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundangan terkait perikanan
- u. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perairan umum

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Madiun telah ditetapkan dalam surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.204/163/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024

Indikator	Target Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	80,64	80,74	80,84	80,94	81,04
Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	95,4	95,5	95,6	95,7	95,8
Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi (%)	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35
Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha)	6,9	7,21	7	-	-
Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi (%)	1,1	1,1	1,12	1,14	1,16
Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi (%)	1,2	1,21	1,214	1,216	1,221
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	18,31	18,31	18,31	-	-
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Skor)	-	-	-	80.1	-
Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	4.48

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Pada dokumen ini juga akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2024 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mandiri

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Sasaran Kinerja, Indikator dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,8 skor
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,3 rasio
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,14 rasio
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,216 rasio
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,48 indeks

Dengan rincian program dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Program dan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran	
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	391,234,000.00
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	58,200,000.00
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	85,631,000.00
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	436,605,000.00
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp	70,022,000.00
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	466,054,000.00
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	2,439,213,000.00
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	1,459,043,910.00
9	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	109,800,000.00
10	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	33,600,000.00
11	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	3,558,495,367.00
12	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	337,591,000.00
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	407,740,090.00
Total		Rp	17,046,261,304.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan pada Bab ini menggambarkan keberhasilan ataupun ketidaktercapaian dari kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun baik capaian kinerja sasaran strategis yang hendak diwujudkan tahun 2024 maupun capaian realisasi keuangannya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan dan Pertanian Pangan Perubahan Tahun 2024 yang telah disepakati.

Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3. 1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Presentase Capaian Realisasi	Kategori Capaian Kinerja Organisasi	Bobot	Rating Kinerja
>100 %	Sangat Baik /Istimewa	5	Diatas Ekspektasi
100 %	Baik	4	Sesuai Ekspektasi
80 % - 99 %	Cukup	3	Dibawah Ekspektasi
60 % - 79 %	Kurang	2	
0 % - 59 %	Sangat Kurang	1	

3.1.1 Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah meningkatkan akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2024, capaian Skor PPH mencapai 95, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 95,8.

Skor PPH diperoleh dari total nilai PPH yang dihitung berdasarkan proporsi konsumsi energi dan pembobotan masing-masing kelompok bahan pangan. Terdapat sembilan kelompok pangan utama yang menjadi komponen perhitungan, yaitu:

1. Kelompok padi-padian
2. Kelompok umbi-umbian
3. Kelompok pangan hewani
4. Kelompok minyak dan lemak
5. Kelompok buah/biji berminyak
6. Kelompok kacang-kacangan
7. Kelompok gula
8. Kelompok sayur dan buah
9. Kelompok lain-lain

Skor PPH ideal adalah 100. Berdasarkan nilai capaian, Skor PPH dalam suatu wilayah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- Kurang (Skor PPH < 80)
- Sedang (Skor PPH 80-90)
- Baik (Skor PPH > 90)

Adapun rumus perhitungan Skor PPH dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Total Skor PPH} = \sum_{i=1}^9 \text{Skor PPH} ; i: \text{Kelompok Pangan}$$

Tabel 3. 2 Skor PPH Kota Madiun tahun 2024

Kelompok Pangan	Standar Nasional (Zona I)					Kota Madiun							
	Berat per kapita		AKE per kapita (kkal/hari)	% AKE	Skor PPH maks.	Berat per kapita		AKE per kapita (kkal/hari)	% AKE Aktual	% AKE*	Skor Aktual	Skor AKE	Skor PPH
	g/hari	kg/tahun				g/hari	kg/tahun						
1. Pati-padian	289	106	1.000	50,0	25,0	262,4	95,8	1.026	50,8	48,8	25,3	24,4	24,4
2. Umbi-umbian	105	38	126	6,0	2,5	41,4	15,1	45	2,2	2,1	1,1	1,1	1,1
3. Pangan hewani	157	57	252	12,0	24,0	124,4	45,4	286	14,1	13,6	28,2	27,2	24,0
4. Minyak dan lemak	21	8	210	10,0	5,0	31,9	11,6	282	13,9	13,4	7,0	6,7	5,0
5. Buah/biji berminyak	11	4	63	3,0	1,0	1,4	0,5	8	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
6. Kacang-kacangan	37	14	105	5,0	10,0	35,6	13,0	92	4,5	4,4	9,1	8,8	8,8
7. Gula	31	11	105	5,0	2,5	17,3	6,3	66	3,3	3,2	1,6	1,6	1,6
8. Sayur dan buah	262	96	126	6,0	30,0	292,9	106,9	174	8,6	8,3	42,8	41,4	30,0
9. Lain-lain	-	-	63	3,0	0,0	91,4	33,4	49	2,4	2,3	-	-	-
Jumlah			2.100	100	100,0			2.028	100,0	96,6	115,3	111,4	95,0
Pangan hewani			252	12,0				286	14,1	13,6			
Pangan nabati			1.848	98,0				1.743	85,9	83,0			

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi Sasaran Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat yaitu 95 skor dari target yang telah ditentukan sebesar 95.8 skor dengan capaian kinerja 99,16 %. Pola konsumsi penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, sosial budaya, tingkat pengetahuan, dan sosial ekonomi. Ketersediaan pangan yang cukup memberikan peluang terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan bagi setiap individu.

Pola konsumsi pangan yang diterapkan di lingkungan keluarga menentukan kualitas konsumsi, baik keberagaman maupun keseimbangan konsumsi pangan, Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah dan menjadi indikator kunci keberhasilan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi

gizi masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pencapaian skor PPH Kota Madiun tahun 2024 sebesar 95,0 lebih rendah dibandingkan targetnya. Walaupun demikian, skor PPH Kota Madiun masih termasuk kategori baik, bahkan lebih tinggi dibandingkan skor PPH Provinsi Jawa Timur (93,9) dan nasional (93,5).

Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Skor PPH Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,8	95	99,16 %

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

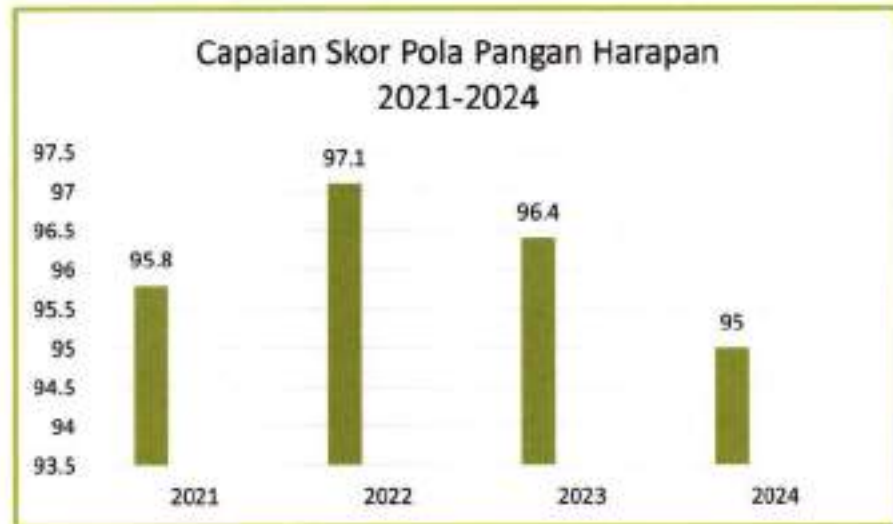
Akses pangan yang baik dan pola konsumsi yang seimbang menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang menggambarkan tingkat keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan di masyarakat.

Pada tahun 2021, Skor PPH berada di angka 95,8 dan mengalami peningkatan menjadi 97,1 pada tahun 2022. Namun, dalam dua tahun terakhir, skor ini mengalami penurunan, dengan angka 96,4 pada tahun 2023 dan 95 pada tahun 2024. Penurunan ini bisa menjadi indikasi adanya tantangan dalam akses pangan yang seimbang, baik dari segi ketersediaan maupun keterjangkauan berbagai jenis bahan pangan.

Faktor-faktor seperti preferensi masyarakat, daya beli, serta ketersediaan pangan lokal dapat mempengaruhi pola konsumsi

masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya diversifikasi pangan serta memperbaiki sistem distribusi agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses makanan yang bernutrisi secara merata.

Gambar 3. 1 Capaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021-2024



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Madiun tahun 2024 mencapai 95, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 95,8. Berdasarkan kategori Skor PPH, capaian tersebut termasuk dalam kategori baik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Kota Madiun semakin beragam dan sesuai dengan prinsip gizi seimbang.

Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat. Program yang dijalankan mencakup edukasi mengenai pola makan yang sehat dan bergizi, penguatan ketahanan pangan berbasis keluarga, serta pemanfaatan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola makan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman

(B2SA), guna memastikan asupan nutrisi yang cukup serta mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis bahan pangan tertentu.

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Skor PPH Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,8	95	99,16 %

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Madiun pada tahun 2024 mencapai 95, sedikit lebih rendah dari target RPJMD yang ditetapkan sebesar 95,8. Meskipun demikian, capaian ini masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur yang sebesar 93,9 dan capaian nasional yang berada di angka 93,5. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Kota Madiun lebih beragam dan mendekati standar gizi yang dianjurkan dibandingkan dengan rata-rata daerah lain di tingkat provinsi maupun nasional.

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Skor PPH Kota Madiun, Provinsi dan Nasional

Sasaran	Indikator	Kota Madiun	Provinsi Jatim	Nasional
Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95	93,9	93,5

5) Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024 sebesar 95 masih sedikit di bawah target 95,8. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pola konsumsi masyarakat yang belum seimbang, dengan dominasi padi-padian serta rendahnya konsumsi sayur, buah, dan protein nabati. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pangan beragam akibat faktor ekonomi dan distribusi turut memengaruhi pencapaian skor. Gangguan produksi pangan akibat perubahan iklim juga berdampak pada ketersediaan bahan pangan yang beragam, sementara kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan sehat masih perlu ditingkatkan.

Tren konsumsi makanan instan dan olahan yang tinggi lemak, gula, dan garam semakin memperburuk ketidakseimbangan pola makan. Untuk meningkatkan capaian Skor PPH di masa mendatang, diperlukan strategi yang lebih efektif, seperti edukasi gizi yang lebih luas, peningkatan produksi dan distribusi pangan lokal, serta kebijakan yang mendukung akses pangan sehat bagi seluruh masyarakat.

3.1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan

Sasaran peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan diukur melalui indikator rasio pendapatan pelaku usaha perikanan terhadap biaya produksi, dengan target sebesar 1,35. Indikator ini mencerminkan keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh pelaku usaha perikanan dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam menjalankan usahanya.

Adapun rumus Rasio Pendapatan pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi yaitu :

$$Rasio = \frac{\text{Pendapatan Pelaku Usaha perikanan}}{\text{Biaya Produksi}}$$

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan indikator utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi. Realisasi Tahun 2024 sebesar 1,35 dari target sebesar 1,35 dengan capaian kinerja 100%. Keberhasilan ini mencerminkan efisiensi usaha perikanan yang terus membaik. Untuk menjaga keberlanjutan, berbagai program dijalankan sesuai Renstra, termasuk pengembangan usaha olahan perikanan guna meningkatkan konsumsi ikan di Kota Madiun. Peningkatan konsumsi diharapkan mendorong pertumbuhan produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan.

Tabel 3. 6 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,35 rasio	1,35 rasio	100 %

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha perikanan. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan mereka adalah rasio pendapatan terhadap biaya produksi.

Pada tahun 2021, rasio ini berada di angka 1,43, yang menunjukkan bahwa pendapatan para pelaku usaha perikanan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi mereka. Namun, pada

tahun 2022, angka ini turun menjadi 1,25 yang menandakan adanya peningkatan biaya operasional atau penurunan pendapatan. Pada tahun 2023, rasio kembali mengalami kenaikan menjadi 1,31, dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 1,35.

Gambar 3. 2 Capaian Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi Tahun 2021-2024



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi pada tahun 2024 telah mencapai angka 1,35, sesuai dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD. Capaian 100% ini mencerminkan keseimbangan yang baik antara pendapatan yang diperoleh pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan mampu menjaga efisiensi dalam operasionalnya, sehingga keuntungan yang diperoleh tetap optimal. Stabilitas harga jual ikan dan pengelolaan biaya produksi yang efektif menjadi faktor utama dalam pencapaian target ini.

Keberhasilan mencapai rasio yang ditargetkan juga mencerminkan kondisi usaha perikanan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan keseimbangan yang terjaga antara pendapatan dan biaya produksi, para pelaku usaha perikanan dapat terus beroperasi tanpa mengalami tekanan finansial yang berlebihan. Hal ini juga berdampak positif terhadap ketahanan ekonomi di sektor perikanan, baik bagi nelayan maupun pembudidaya ikan. Ke depan, upaya mempertahankan dan meningkatkan efisiensi produksi harus tetap dilakukan agar sektor perikanan tetap berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,35 rasio	1,35 rasio	100 %

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Capaian rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi pada tahun 2024 mencapai 1,35, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 1,35. Dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa target yang direncanakan telah berhasil dicapai secara optimal. Namun, indikator ini tidak memiliki padanan yang sama di tingkat provinsi maupun nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbedaan metode pengukuran atau indikator yang digunakan dalam laporan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional bisa menjadi salah satu penyebabnya.

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi Kota Madiun, Provinsi dan Nasional

Sasaran	Indikator	Kota Madiun	Provinsi Jatim	Nasional
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	1,35 rasio	N/A	N/A

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Capaian rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi pada tahun 2024 telah mencapai target sebesar 1,35 atau 100%. Keberhasilan ini didukung oleh efisiensi produksi, stabilitas harga ikan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung sektor perikanan. Penerapan teknologi, manajemen usaha yang efektif, serta pelatihan bagi pelaku usaha turut menjaga keseimbangan antara pendapatan dan biaya produksi. Selain itu, akses pasar yang lebih luas juga berkontribusi terhadap kestabilan usaha perikanan.

Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku usaha perikanan adalah peningkatan produksi perikanan. Produksi perikanan pada tahun 2024 mencapai 386,30 ton, meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 379,5 ton, dengan capaian kinerja 101,93% dari target 379 ton. Tren produksi perikanan di Kota Madiun cenderung meningkat, terutama dalam budidaya ikan air tawar. Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) pada tahun 2024 tercatat sebanyak 262 RTP, naik 3,7% dari tahun 2022 yang berjumlah 245 RTP. Namun, sebagian lahan kolam beralih fungsi menjadi bangunan, menyebabkan beberapa pembudidaya berhenti beroperasi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, berbagai solusi telah dilakukan, seperti peningkatan kapasitas nelayan dan

pembudidaya ikan melalui pelatihan, penguatan akses pasar, serta dukungan pembiayaan dan infrastruktur. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perikanan dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para pelaku usaha.

3.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Sasaran peningkatan kesejahteraan petani diukur melalui indikator Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi, dengan target yang ditetapkan sebesar 1,16. Indikator ini mencerminkan keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh petani dengan biaya produksi yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha pertanian.

Adapun rumus Rasio Pendapatan petani dengan Biaya Produksi yaitu :

$$Rasio = \frac{\text{Pendapatan Petani}}{\text{Biaya Produksi}}$$

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi sasaran peningkatan kesejahteraan petani pada tahun 2024 mencapai 1,20 dari target sebesar 1,16 dengan capaian kinerja sebesar 103,44%, melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor, di antaranya tersalurnya bantuan pupuk secara optimal kepada petani, yang membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Selain itu, pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi petani berjalan sesuai dengan rencana, memberikan wawasan serta keterampilan baru dalam penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien. Dengan adanya dukungan ini, petani mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha tani mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan serta ketahanan sektor pertanian secara keseluruhan.

Tabel 3. 9 Perbandingan antara Realisasi dan Target Indikator Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kesejahteraan petani	Rasio pendapatan petani dengan Biaya Produksi	1,16 rasio	1,20 rasio	103,44 %

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Rasio pendapatan petani terhadap biaya produksi menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 dan 2022, rasio masih di angka 1,10, mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dan biaya usaha tani. Kemudian, pada 2023, rasio naik menjadi 1,14, menandakan peningkatan keuntungan akibat efisiensi dan produktivitas yang lebih baik. Tren positif ini berlanjut pada 2024 dengan kenaikan rasio menjadi 1,20, yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani.

Gambar 3. 3 Capaian Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi Tahun 2021-2024



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi pada tahun 2024 mencapai 1,20, melampaui target akhir RPJMD sebesar 1,16 dengan capaian kinerja 103,44%. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh petani dengan biaya produksi yang mereka keluarkan. Capaian yang lebih tinggi dari target ini menunjukkan bahwa pendapatan petani mengalami peningkatan, sehingga kesejahteraan mereka juga semakin membaik. Hal ini menjadi indikator positif dalam perkembangan sektor pertanian, di mana petani dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,16 rasio	1,20 rasio	103,44 %

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Capaian rasio pendapatan petani terhadap biaya produksi pada tahun 2024 mencapai 1,20, melebihi target yang ditetapkan sebesar 1,16. Dengan capaian kinerja 103,44%, target yang direncanakan telah tercapai secara optimal. Namun, indikator ini tidak memiliki padanan yang sama di tingkat provinsi maupun nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbedaan metode pengukuran atau indikator yang digunakan dalam laporan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional dapat menjadi salah satu penyebabnya.

Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi Kota Madiun, Provinsi dan Nasional

Sasaran	Indikator	Kota Madiun	Provinsi Jatim	Nasional
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,20 rasio	N/A	N/A

5) Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Capaian indikator rasio pendapatan petani terhadap biaya produksi pada tahun 2024 mencapai 1,20, melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,16. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi usaha tani, meskipun terdapat tantangan dalam produksi. Produktivitas pertanian juga mengalami peningkatan dari 6,95 ton per hektar pada tahun 2023 menjadi 7 ton per hektar pada tahun 2024. Peningkatan ini tidak lepas dari dukungan program bantuan pupuk NPK Plus dan pupuk hayati yang diberikan kepada 38 kelompok tani di Kota Madiun. Pupuk hayati terbukti berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah dengan membantu pelepasan unsur hara fosfor (P) dan kalium (K), yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh optimal. Penggunaan pupuk hayati bersama pupuk kimia disarankan agar kualitas tanah tetap terjaga dalam jangka panjang.

Meskipun produktivitas per hektar meningkat, total produksi padi justru mengalami penurunan sebesar 6,04%, dari 16.771 ton pada tahun 2023 menjadi 15.757 ton pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya luas lahan panen dari 2.413 hektar menjadi 2.251 hektar. Berkurangnya lahan panen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti alih fungsi lahan dan perubahan pola tanam akibat kondisi cuaca. Oleh karena itu, selain meningkatkan

produktivitas melalui bantuan pupuk dan teknologi pertanian, diperlukan upaya strategis dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Dengan pengelolaan lahan yang optimal serta penerapan teknologi pertanian yang berkelanjutan, diharapkan produksi padi dapat kembali meningkat dan mendukung ketahanan pangan di Kota Madiun.

3.1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan

Sasaran meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan diukur melalui indikator Rasio Pendapatan pelaku usaha peternakan dengan Biaya Produksi, dengan target yang ditetapkan sebesar 1,221. Indikator ini mencerminkan keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha di bidang peternakan.

Adapun rumus Rasio Pendapatan pelaku Usaha peternakan dengan Biaya Produksi yaitu :

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan}}{\text{Biaya Produksi}}$$

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi sasaran peningkatan kesejahteraan pelaku usaha peternakan di Kota Madiun pada tahun 2024 mencapai 1,26, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 1,221. Dengan capaian kinerja sebesar 103,20%, hasil ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi para peternak. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, terutama dalam pengendalian dan pencegahan penyakit menular pada ternak. Berkurangnya kejadian penyakit menular menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan nilai jual ternak, sehingga memberikan keuntungan lebih bagi para peternak.

Tabel 3. 12 Perbandingan antara Realisasi dan Target Indikator Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan Biaya Produksi	1,221 rasio	1,26 rasio	103,20 %

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Rasio pendapatan terhadap biaya produksi merupakan indikator penting dalam menilai tingkat keuntungan dan keberlanjutan usaha peternakan. Pada periode 2021 hingga 2023, rasio ini stabil di angka 1,4, menunjukkan bahwa pelaku usaha peternakan masih memperoleh keuntungan yang cukup baik. Stabilitas rasio tersebut mencerminkan keseimbangan antara biaya produksi dan pendapatan yang diterima peternak, yang didukung oleh harga jual hasil peternakan yang relatif stabil, efisiensi dalam pengelolaan usaha, serta dukungan kebijakan di sektor peternakan. Keberlanjutan usaha ini menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing dan kesejahteraan peternak.

Namun pada tahun 2024, rasio ini mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 1,26 yang mengindikasikan adanya tantangan baru dalam usaha peternakan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah wabah penyakit yang menyerang hewan ternak, yang berdampak pada peningkatan biaya produksi akibat perlunya pengobatan dan tindakan pencegahan. Meski demikian, kondisi ini dapat dikendalikan melalui upaya mitigasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, seperti pemberian vaksin, peningkatan pelayanan kesehatan hewan, serta pendampingan bagi peternak dalam menerapkan manajemen peternakan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan usaha peternakan dapat kembali stabil, meningkatkan daya tahan

terhadap tantangan di masa depan, serta menjaga kesejahteraan para pelaku usaha peternakan.

Gambar 3. 4 Capaian Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi Tahun 2021-2024



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan pada akhir RPJMD ditargetkan sebesar 1,221, namun realisasi tahun 2024 mencapai 1,260, atau 103,20% dari target. Capaian ini mencerminkan perkembangan positif di sektor peternakan, di mana peternak memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi yang mereka keluarkan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil ternak, meningkatnya efisiensi dalam proses produksi, serta dukungan dari pemerintah melalui berbagai pelatihan dan program pendampingan.

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan Biaya Produksi	1,221 rasio	1,260 rasio	103,20 %

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Capaian rasio pendapatan pelaku usaha peternakan terhadap biaya produksi pada tahun 2024 mencapai 1,260, melebihi target yang ditetapkan sebesar 1,221. Dengan capaian kinerja sebesar 103,20%, target yang direncanakan telah tercapai secara optimal. Namun, indikator ini tidak memiliki padanan yang sama di tingkat provinsi maupun nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbedaan metode pengukuran atau indikator yang digunakan dalam laporan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional dapat menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian tersebut.

Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi Kota Madiun, Provinsi dan Nasional

Sasaran	Indikator	Kota Madiun	Provinsi Jatim	Nasional
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi	1,260 rasio	N/A	N/A

5) Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Capaian rasio pendapatan pelaku usaha peternakan terhadap biaya produksi pada tahun 2024 sebesar 1,26 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,4. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya masih maraknya penyakit hewan menular yang berdampak pada kesehatan dan produktivitas ternak, serta turunnya nilai jual produk peternakan di pasaran. Kondisi ini menyebabkan pendapatan peternak tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan, sehingga profitabilitas usaha peternakan mengalami penurunan dibanding tahun

sebelumnya. Tantangan ini mengharuskan adanya langkah strategis dalam pengelolaan kesehatan hewan dan stabilisasi harga jual hasil peternakan agar sektor ini tetap tumbuh secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor peternakan, APBD 2024 mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelayanan dan pemeliharaan kesehatan hewan melalui program pengobatan gratis bagi ternak di wilayah Kota Madiun. Program ini diharapkan dapat menekan angka kematian ternak, meningkatkan daya tahan hewan terhadap penyakit, serta memastikan produktivitas ternak tetap optimal. Dengan meningkatnya kesehatan ternak, diharapkan pendapatan peternak juga dapat kembali stabil, sehingga mereka mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi tantangan di sektor peternakan.

3.1.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur melalui Indikator Indeks Pelayanan Publik, dengan target yang ditetapkan sebesar 4,48. Indikator ini mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat, mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kemudahan akses terhadap layanan publik. Capaian indeks ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, guna meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong efektivitas birokrasi. Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2024 mencapai 4,68 indeks, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 4,48 indeks. Dengan capaian kinerja sebesar

104,50%, hasil ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin efektif dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.

Tabel 3. 15 Perbandingan antara Realisasi dan Target Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024

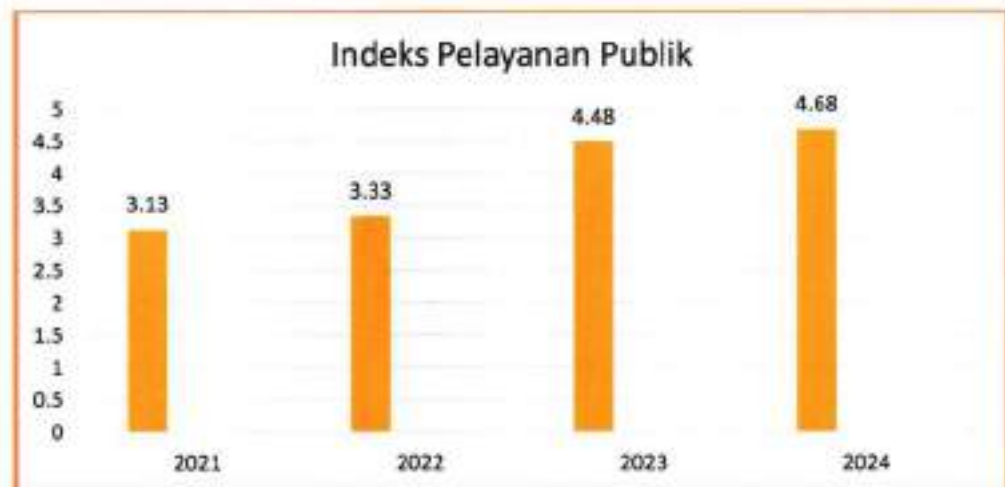
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkanya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,48	4,68 rasio	104,50 %

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indeks Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam tata kelola layanan publik di sektor ini. Pada tahun 2021, indeks ini tercatat sebesar 3,13, kemudian mengalami peningkatan menjadi 3,30 pada tahun 2022. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian indeks sebesar 4,48, yang kemudian terus meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 4,68.

Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui peningkatan kapasitas aparatur, penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi, maupun perbaikan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Gambar 3. 5 Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2024



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir RPJMD

Indeks Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 mencapai 4,68, melebihi target akhir RPJMD sebesar 4,48 dengan capaian 104,50%, menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas berbagai upaya yang dilakukan, seperti digitalisasi layanan publik, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan dengan lebih cepat dan efisien, serta transparansi administrasi dan peningkatan kapasitas aparatur yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,48 indeks	4,68 Indeks	104,50 %

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Capaian indeks pelayanan publik pada tahun 2024 mencapai 4,68, melebihi target yang ditetapkan sebesar 4,48. Dengan capaian kinerja 104,50%, target yang direncanakan telah tercapai secara optimal. Namun, indikator ini tidak memiliki padanan yang sama di tingkat provinsi maupun nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbedaan metode pengukuran atau indikator yang digunakan dalam laporan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional dapat menjadi salah satu penyebabnya.

Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Provinsi dan Nasional

Sasaran	Indikator	Kota Madiun	Provinsi Jatim	Nasional
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.68 indeks	N/A	N/A

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Indeks Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 dengan capaian sebesar 4,68 rasio, merupakan hasil dari berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan. Faktor utama yang mendorong keberhasilan ini meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, optimalisasi sistem pelayanan berbasis teknologi, serta penyederhanaan prosedur layanan agar lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di sektor ketahanan pangan dan pertanian juga menjadi faktor penting dalam mendorong perbaikan layanan. Dengan

semakin transparan dan akuntabelnya pelayanan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus meningkat, yang berdampak positif pada efektivitas program dan kebijakan di sektor ini.

Untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah telah menerapkan berbagai solusi strategis. Salah satunya adalah pengawasan dan evaluasi berkala guna mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem pelayanan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan komunitas pertanian, juga diperkuat guna menghadirkan kebijakan yang lebih inovatif dan tepat sasaran. Di samping itu, program pelatihan berkelanjutan bagi aparatur terus digalakkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan pelayanan publik di sektor ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan semakin berkualitas, efektif, dan berdampak positif bagi masyarakat.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menunjukkan bahwa realisasi anggaran sebesar Rp 15.868.224.488,00 lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran sebesar Rp 17.046.261.304,00 , menghasilkan efisiensi sebesar 10,47%. Efisiensi ini menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan mampu mencapai atau bahkan melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat. Secara keseluruhan, efisiensi ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang baik, namun evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, terutama dalam program yang masih memiliki potensi efisiensi lebih besar.

Tabel 3. 18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran
1	2	3	4	$5 = (4/3) \times 100$	6	7	$8 = 5 \times 6$	$9 = 8 - 7$
Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95.8	95	99.16%	535,065,000	521,153,936	530,596,816.28	9,442,880.28
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1.35	1.35	100.00%	972,681,000	953,373,337	972,681,000.00	19,307,663.00
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1.16	1.2	103.45%	7,600,152,277	6,864,889,417	7,862,226,493.45	997,337,076.45
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1.221	1.26	103.19%	407,740,090	403,687,255	420,763,729.24	17,076,474.24
Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik	4.48	4.68	104.46%	7,530,622,937	7,125,120,543	7,866,811,460.97	741,690,917.97
					17,046,261,304	15,868,224,488	17,653,079,499.94	1,784,855,011.94
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA								10.47%

3.1.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Kota Madiun Kota Madiun pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akses Pangan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat

Berikut ini adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian sasaran meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat :

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	95,8	535,065,000	95	521,153,936
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi	%	100	391,234,000	101.40	384,261,800
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	%	100	226,234,000	100	222,766,400
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	175,609,000	1	173,811,300
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	2	17,200,000	2	15,540,300
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok Strategis	Laporan	4	33,425,000	4	33,414,800
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan Energi	kkal / kapita	2060	165,000,000	2028	161,495,400
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	43,700,000	1	40,458,250
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2	121,300,000	2	121,037,150
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	22	58,200,000	22	56,927,600
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Dokumen	1	58,200,000	1	56,927,600
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	58,200,000	1	56,927,600
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji	%	80	85,631,000	92,32%	79,964,536

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Lokasi	8	85,631,000	11	79,964,536
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	60,656,000	1	55,533,836
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	24,975,000	1	24,430,700

2) Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan

Berikut ini adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan :

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan		Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	rasio	1.35	972,681,000	1.35	953,373,337
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	290	436,605,000	290.1	431,218,363
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan / kemitraan usaha / kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	RTP	260	436,605,000	262	431,218,363
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	224,955,000	2	223,255,242



Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	155,800,000	6	152,460,521
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	120	55,850,000	120	55,502,600
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	89	70,022,000	96.2	67,230,200
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan / penyuluhan dan pendampingan / kemitraan usaha / kemudahan akses iptek dan informasi / dan penguatan kelembagaan)	Orang	435	70,022,000	440	67,230,200
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	70,022,000	2	67,230,200
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi makan Ikan	Kg/Kapita/Tahun	16.5	466,054,000	20.46	454,924,774
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolahan dan pemasar ikan yang dibina	orang	50	75,000,000	110	73,501,403
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	30	75,000,000	110	73,501,403

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	Ton	26	391,054,000	36	381,423,371
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	14	391,054,000	110	381,423,371

3) Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Berikut ini adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan petani :

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
Meningkatnya Kesejahteraan Petani		Rasio pendapatan petani dengan Biaya Produksi	rasio	1.16	7,494,578,277	1.16	6,761,762,734
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian	%	65	2,333,639,000	7000%	2,316,123,800
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	%	80	2,333,639,000	80	2,316,123,800
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	410,800,000	1	399,150,000
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1,922,839,000	1	1,916,973,800
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	%	100	1,459,043,910	100	1,398,283,225
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	%	100	115,168,000	100	92,163,100

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	114,613,000	1	92,163,100
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	575,000	1	-
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terbangun / rehabilitasi / dipelihara	%	25	1,343,855,910	25	1,306,120,125
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1,925,000	1	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	1,296,919,910	2	1,263,494,425
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	2	1,925,000	2	-
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	43,086,000	1	42,625,700
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan Aman Bencana Pertanian	%	75	109,800,000	8500%	103,461,000
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	Ha / Tahun	2000	109,800,000	2454.75	103,461,000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	50	109,800,000	58.9	103,461,000
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian	%	15	33,600,000	15	12,069,100
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	Jenis	2	33,600,000	2	12,069,100
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	2	33,600,000	2	12,069,100

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	%	40	3,558,495,367	45.00	2,931,825,609
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM petani terlatih	Orang	400	3,558,495,367	549	2,931,825,609
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	38	3,558,495,367	38	2,931,825,609

4) Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan

Berikut ini adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan :

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan		Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan Biaya Produksi	rasio	1.16	513,314,090	1.16	506,813,938
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian	%	65	105,574,000	7000%	103,126,683
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	%	75	105,574,000	75	103,126,683
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	12	105,574,000	12	103,126,683
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	10	407,740,090	1500%	403,687,255
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	%	80	316,000,090	80	313,006,305

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Dalam daerah Kabupaten/Kota						
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	4	316,000,090	4	313,006,305
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jenis pelayanan jasa medik veteriner	Jenis	1 Jenis	0	1 Jenis	-
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	0	0	0	-
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	%	80	91,740,000	10000%	90,680,950
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	10	91,740,000	12	90,680,950

5) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Berikut ini adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian sasaran meningkatnya tata kelola pemerintah perangkat daerah :

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan		Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan Biaya Produksi	rasio	1.16	7,530,622,937	1.16	7,125,120,543
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80.01	7,530,622,937	83.77	7,125,120,543
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	121,747,000	100	120,499,900



Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	121,747,000	8	120,499,900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	4,759,106,937	100	4,380,481,641
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	4,759,106,937	27	4,380,481,641
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perbandingan kinerja ASN yang tercapai	%	100	74,985,800	100	74,491,500
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	74,985,800	5	74,491,500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	1,119,177,500	100	1,111,466,764
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19	767,156,500	19	761,257,650
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	55,953,000	12	55,950,200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	296,068,000	12	294,258,914
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	%	100	733,081,500	100	723,459,150
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	275,785,500	1	273,528,500
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	117,060,000	1	116,379,900
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	340,236,000	78	333,550,750
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	722,524,200	100	714,721,588
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	35	147,411,100	36	141,532,214

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	36,022,500	15	35,888,173
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	490,329,600	4	468,929,701
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	75	48,761,000	75	48,371,500

Seluruh indikator yang menjadi bagian dari Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah berhasil tercapai secara optimal. Pencapaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan strategis, sehingga menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung ketahanan pangan serta pengembangan sektor pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

3.1.8 Hasil Pelaksanaan Gender Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender di Kota Madiun, telah dilakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Kota Madiun telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender. Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian juga telah membentuk tim berdasarkan keputusan kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun nomor : 520/21/401.11.3/2022 tentang focal poin pengarusutamaan gender (PUG) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.

Pada Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan memperhatikan isu gender sebagaimana data berikut :

Tabel 3. 19 Realisasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	KINERJA		KEUANGAN		
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	121,747,000	120,499,900	1,247,100
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	5 Dokumen	74,985,800	74,491,500	494,300
3	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan	175,609,000	173,811,300	1,797,700
4	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	17,200,000	15,540,300	1,659,700
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	4 Laporan	4 Laporan	33,425,000	33,414,800	10,200
6	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	43,700,000	40,458,250	3,241,750
7	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	2 Laporan	121,300,000	121,037,150	262,850
8	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	58,200,000	56,927,600	1,272,400
9	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	60,656,000	55,533,836	5,122,164
10	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	24,975,000	24,430,700	544,300
11	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	120 orang	120 orang	55,850,000	Rp55,502,600	347,400
12	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	70,022,000	Rp67,230,200	2,791,800



NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	KINERJA		KEUANGAN		
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SISA
13	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	30 Unit usaha	110 unit usaha	75,000,000	Rp73,501,403	1,498,597
14	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	1 laporan	410,800,000	Rp399,150,000	11,650,000
15	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	1 laporan	1,922,839,000	Rp1,916,973,800	5,865,200
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 laporan	1 laporan	114,613,000	Rp86,563,700	28,049,300
17	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	575,000	Rp0	575,000
18	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0 unit	0 unit	1,925,000	Rp0	1,925,000
19	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2 unit	2 unit	1,296,919,910	Rp1,263,494,425	33,425,485
20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0 unit	0 unit	1,925,000	Rp0	1,925,000
21	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	58.9 Ha	109,800,000	Rp103,461,000	6,339,000
22	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	33,600,000	Rp12,069,100	21,530,900
23	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	38 Kelompok	38 Kelompok	3,558,495,367	Rp2,931,825,609	626,669,758
TOTAL				8,384,162,077	7,625,917,173	758,244,904

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program/kegiatan anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp 17.046.261.304, - dan terealisasi sebesar Rp 15.868.224.488,- atau terserap sebesar 93,09 %. Adapun rincian Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi		Realisasi Target (%)	Realisasi Anggaran (%)
					Target	Anggaran		
1	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95.8	535,065,000	95	521,153,936	99.16	97.40
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio Pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	1.35	972,681,000	1.35	953,373,337	100.00	98.02
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	1.16	7,600,152,277	1.20	6,864,889,417	103.45	90.33
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	1.221	407,740,090	1.260	403,687,255	103.19	99.01
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik	4.48	7,530,622,937	4.68	7,125,120,543	104.46	94.62
				17,046,261,304		15,868,224,488		93.09

BAB IV

PENUTUP

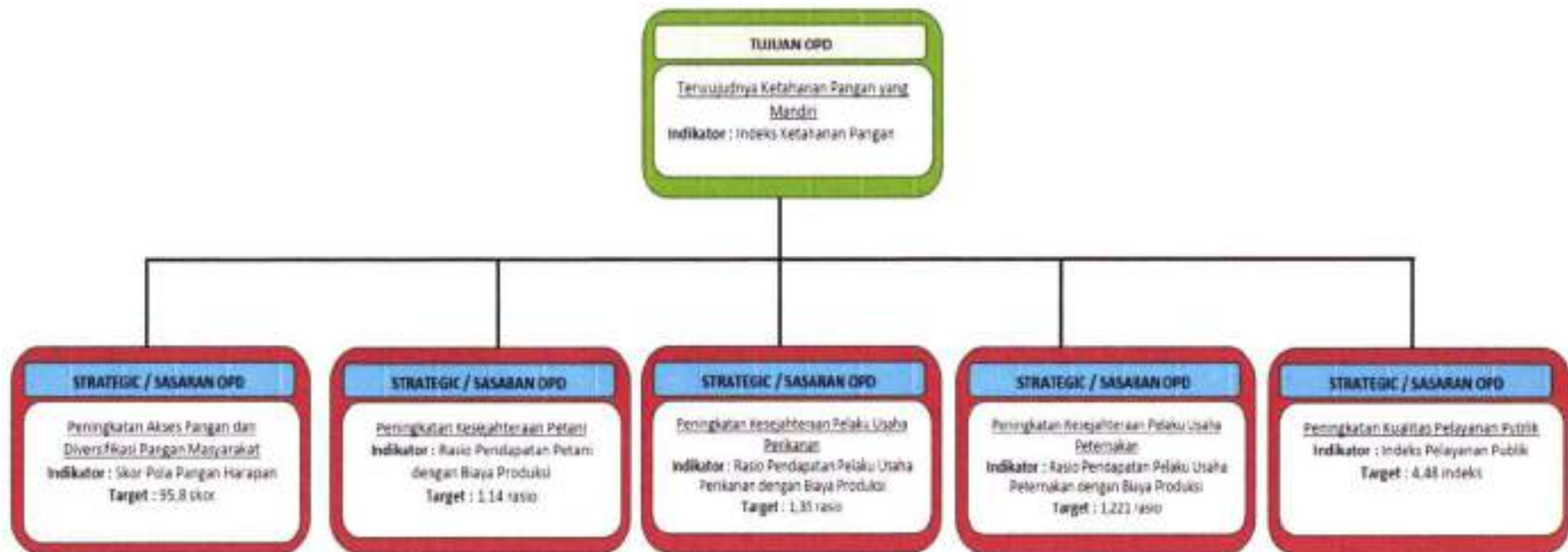
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2024 ini sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun berdasarkan suatu sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kinerja Sasaran. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun berkategori sangat baik dengan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 102 %.

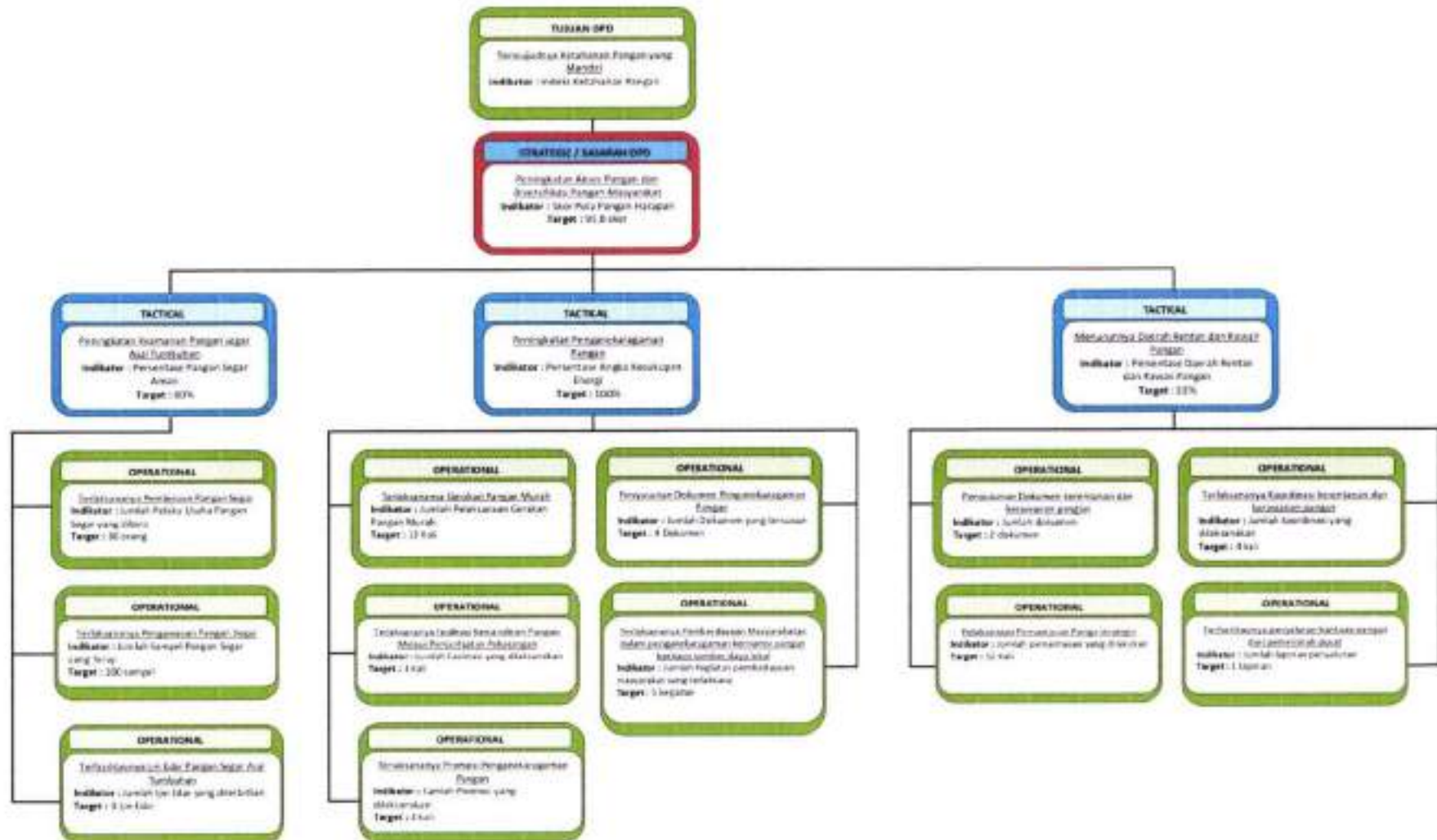
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2024 ini dibuat dan disajikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

LAMPIRAN

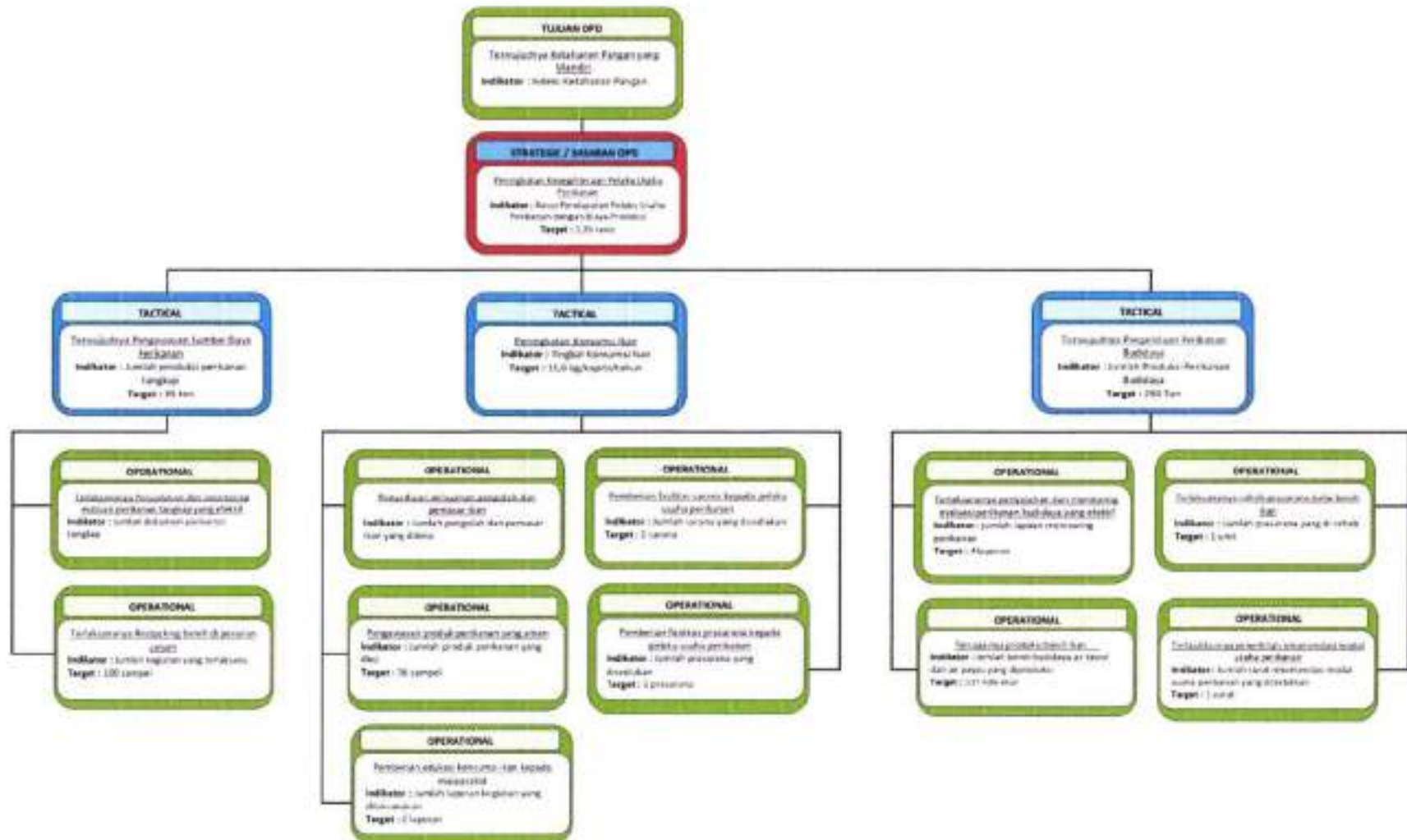
1. Pohon Kinerja



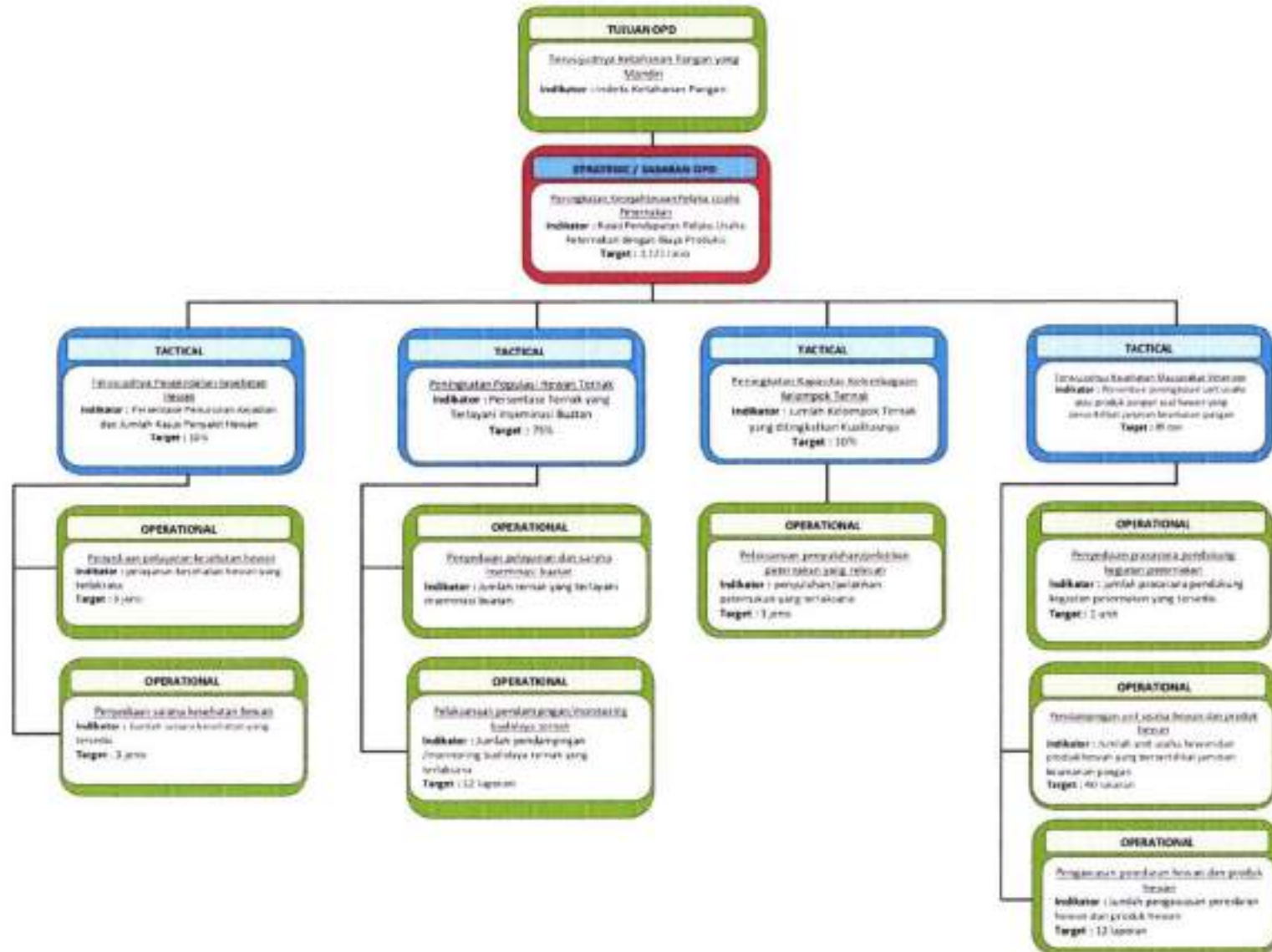
1.1 Peningkatan Akses Pangan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat



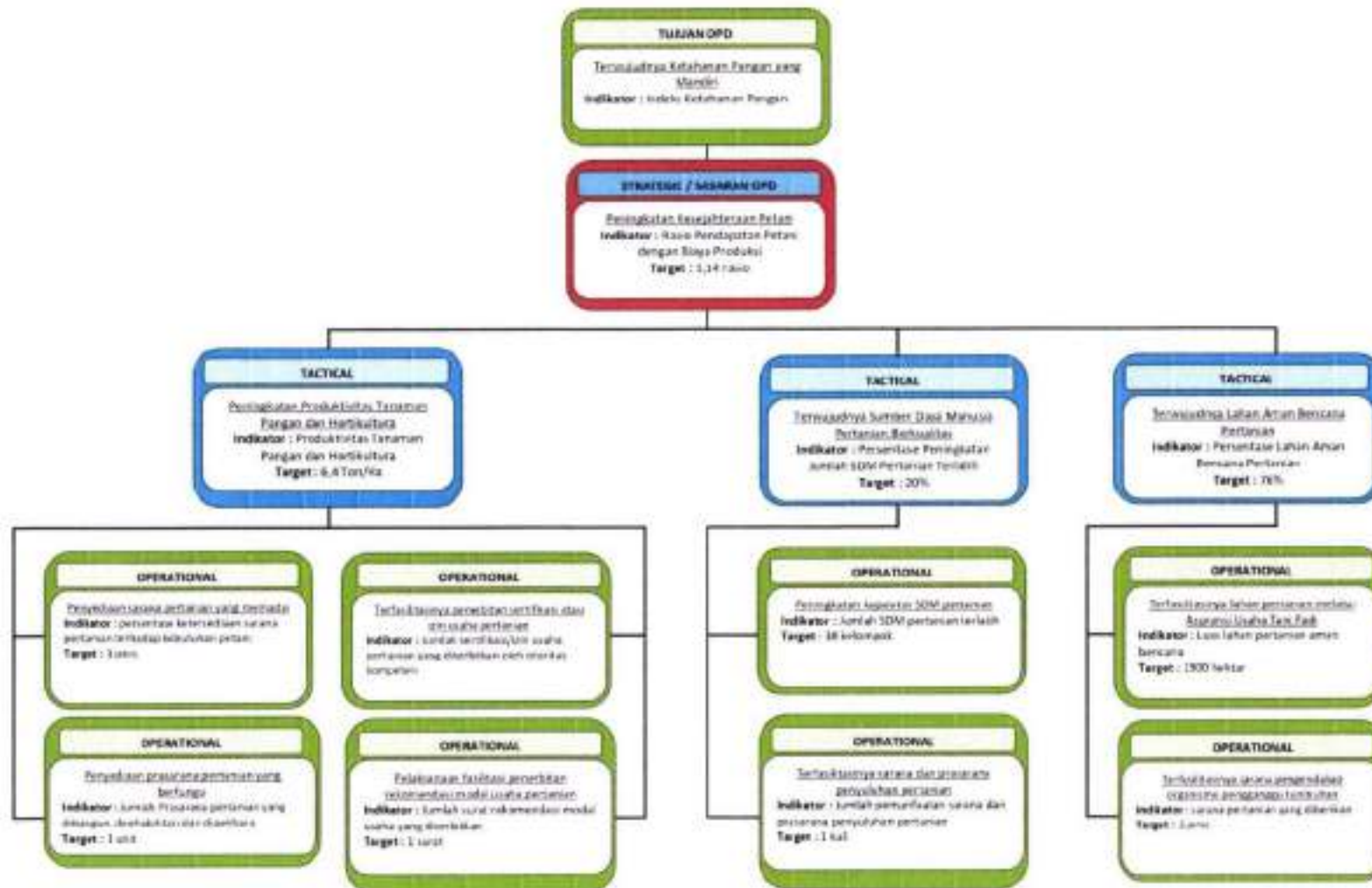
1.2 Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan



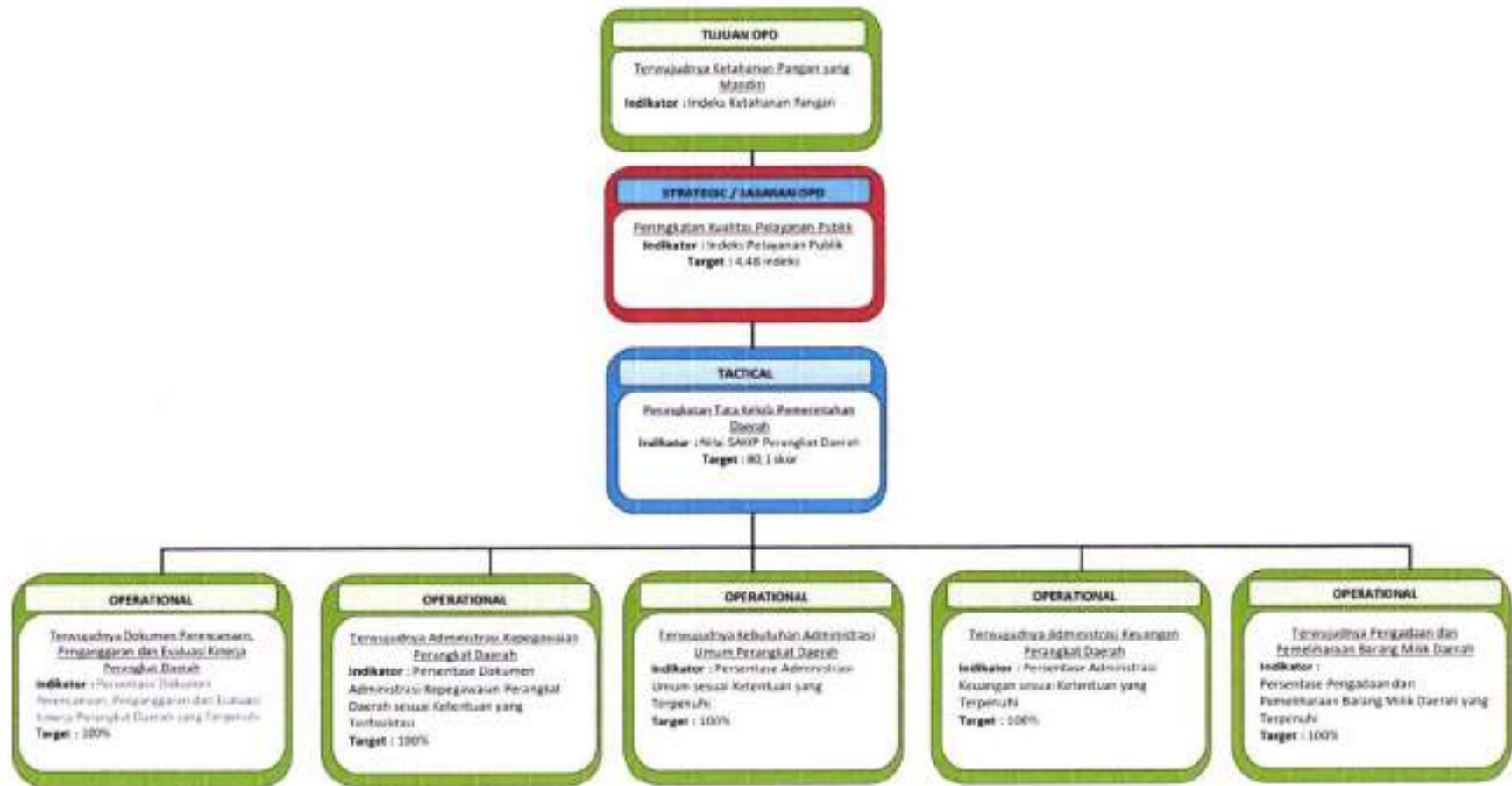
1.3 Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan



1.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani



1.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



2. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

[illegible]

PROGRAM DAN KEGIATAN						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rg et	pendanaan (Rp)
Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah cadangan pangan daerah dan masyarakat (ton)				120	120	56,726,000										
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Prosentase Angka Kecukupan Energi (%)	Prosentase Angka Kecukupan Energi (%)		100			100	1,287,926,000	100	1,095,000,000	100	289,962,000	100	448,000,000	100	3,140,888,000
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi		Ketersediaan Pangan Utama (ton) / 16200	Prosentase Ketersediaan Pangan utama (%)		16200			16200	309,866,000	100	300,000,000	100	166,457,000	100	225,000,000	100	1,001,323,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1 050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	pendanaan (Rp)
Pasokan dan Harga Pangan																	
Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Jumlah Dokumen (Prognosa Panel Harga dan Neraca Bahan Pangan) / 2	Jumlah Dokumen (NBM, Prognosa Kebutuhan, Neraca Pangan Strategis)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (laporan)	2			2	55,050,000	3	60,000,000	3	16,713,500	3	30,000,000	3	161,763,500
Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Produksi Pangan Hasil Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (kg) / 2000	Tertanganinya Kerawanan Pangan (kelompok)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (laporan)	2000			2000	172,816,000	27	180,000,000	1	117,252,000	1	150,000,000	1	620,068,000
Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah Dokumen stok pasokan dan harga pangan (Tingkat grosir, Tingkat eceran, Tingkat	Jumlah Dokumen stok pasokan dan harga pangan (Tingkat grosir,	Pemantauan Stok, pasokan dan Harga pangan (dokumen)	4			4	82,000,000	4	60,000,000	4	32,491,500	4	45,000,000	4	219,491,500

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1 050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rg et	pendanaan (Rp)
		produsen, Rekapitulasi)	Tingkat eceran, Tingkat produsen, Rekapitulasi)														
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kapita)	Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kapita)		2100			210 0	978,060,000	210 0	795,000,000	210 0	123,505,00 0	210 0	243,000,00 0	21 00	2,139,565,000
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		2			2	55,050,000	2	45,000,000	1	24,855,000	1	38,000,000	1	162,905,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr I 050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	pendanaan (Rp)
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan konsumsi pangan yang beragam , bergizi dan seimbang (kali)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan konsumsi pangan yang beragam , bergizi dan seimbang (kali)	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	3			3	854,584,000	2	700,000,000	3	98,650,000	3	150,000,000	3	1,803,234,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Jumlah koordinasi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per tahun	Jumlah koordinasi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (laporan)	1			1	68,426,000	1	50,000,000	0	-	1	55,000,000	1	173,426,000
Program Penanganan kerawanan Pangan			Prosentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan (%)									25 %	43,842,500	22 %	45,090,000		88,842,500

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	pendanaan (Rp)
Kegiatan Penyusunan Peta kerentanan dan Ketahanan pangan Kecamatan			Tersedianya Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (dokumen)									1	43,842,500	1	45,000,000	1	88,842,500
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			Jumlah Data Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (dokumen)	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (dokumen)								2	43,842,500	2	45,000,000	2	88,842,500
Program Pengawasan Keamanan Pangan		Prosentase Pangan Segar Aman yang teruji (%)	Prosentase Pangan Segar Aman yang teruji (%)		80			80	211,622,000	80	175,000,000	80	86,182,500	80	131,000,000	80	603,804,500
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah		Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar (lokasi)	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan		8			8	211,622,000	8	175,000,000	8	86,182,500	8	131,000,000	8	603,804,500

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1 050-S889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rg et	pendanaan (Rp)
Kabupaten/Kota			Segar (okasi)														
Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota		Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan (orang)	Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan (orang)	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina (Dokumen)	450			180	128,033,000	200	100,000,000	1	25,139,500	1	70,000,000	1	323,172,500
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa (sampel)	Jumlah Sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa (sampel)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	45			45	83,589,000	45	75,000,000	1	61,043,000	1	61,000,000	1	280,632,000
							511,783,300		755,345,600		897,732,000		408,932,000		617,500,000		2,679,509,600

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1 050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rg et	pendanaan (Rp)
Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (%)				1	1	511,783,300										
Kegiatan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap (ton)				320	320	412,505,000										
Kegiatan Peningkatan Mutu, Pengolahan dan Promosi Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)				15.25	15.25	99,278,300										
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)		277			277	296,130,000	280	395,000,000	285	159,900,000	290	235,500,000	290	1,086,530,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1 050-S889 Tahun 2021		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	pendanaan (Rp)
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap (ton/tahun)			378			378	243,130,000	-	-	-	-	-	-	378	243,130,000
Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan , Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Peserta Pelatihan (orang)	-		180			180	243,130,000	-	-	-	-	-	-	180	243,130,000
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan		245			245	53,000,000	245	395,000,000	250	159,900,000	260	235,500,000	260	843,400,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Keppmendagr 1050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	pendanaan (Rp)
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana yang diperbaiki (unit/tahun)	Jumlah Prasarana yang diperbaiki (unit/tahun)	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	2			2	53,000,000	2	150,000,000	0	0	1	50,000,000	1	253,000,000
Sub Kegiatan Pengimanan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	Jumlah Sarana yang tersedia (paket)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	4			-	-	4	20,000,000	3	20,000,000	4	30,000,000	4	70,000,000
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		-	Jumlah dokumen penyuluhan, pembinaan dan monitoring pembudidayaan ikan	Jumlah pembudidayaan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan	3			-	-	3	225,000,000	100	139,900,000	120	155,500,000	120	520,400,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rg et	pendanaan (Rp)
				n ikan di darat (orang)													
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		-	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)		89			-		89	80,000,000	89	35,000,000	89	41,000,000	89	156,000,000
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		-	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan		435			-		435	80,000,000	435	35,000,000	435	41,000,000	435	156,000,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta r g et	pendanaan (Rp)
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		-	Jumlah dokumen Penyuluhan, Monitoring Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (dokumen)	2			-		2	80,000,000	2	35,000,000	2	41,000,000	2	156,000,000
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) / 15,6	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)		15,6			15,6	459,215,600	16	422,732,000	16,1	214,032,000	16,5	341,000,000	16,5	1,436,979,600

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rg et	pendanaan (Rp)
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina (orang)	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina (orang)		50			50	459,215,600	50	141,540,000	50	67,141,000	50	75,000,000	50	742,896,600
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan (orang) / 488	Jumlah dokumen penyuluhan, pembinaan dan monitoring pengolah dan pemasar ikan (dokumen)	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan	488			488	459,215,600	3	141,540,000	30	67,141,000	30	75,000,000	30	142,000,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rg et	pendanaan (Rp)
				penasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko (unit usaha)													
Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga (ton)		24			-	-	24	281,192,000	26	146,891,000	26	266,000,000	26	694,083,000
Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah	-		Jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapat fasilitas (UNKM)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10			-	-	10	281,192,000	12	146,891,000	14	266,000,000	14	290,000,000

[illegible]

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rget	pendanaan (Rp)
Hewan Peliharaan																	
Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase sampel bahan pangan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Ubul dan Halal; %)				94,75	94,75	90,657,720										
Program Penyediaan dan Pengemban gan Sarana Pertanian		Efektifitas Sarana Pertanian (%)	Efektifitas Sarana Pertanian (%)		50			50	1,608,737,6 00	55	1,781,771,6 00	60	2,000,624 ,000	65	2,871,000 ,000	65	8,262,133,2 00
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani (%)	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani (%)		50			50	1,350,937,600	75	1,581,771,60 0	75	1,930,184,0 00	80	2,771,000, 000	80	7,633,893,200

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1 050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rg et	pendanaan (Rp)
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah monitoring dan evaluasi pengawasan penggunaan sarana pertanian (lokasi)	Jumlah monitoring dan evaluasi pengawasan penggunaan sarana pertanian (lokasi)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	39			39	326,588,200	39	50,000,000	1	23,550,000	1	26,000,000	39	426,138,200
Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah sarana pertanian yang diberikan (paket)	Jumlah sarana pertanian yang diberikan (paket)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1			1	1,024,349,400	2	1,531,771,600	1	1,906,634,000	1	2,745,000,000	2	7,207,755,000
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah		Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik (%)	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik (%)		75			75	257,800,000	75	200,000,000	75	70,440,000	75	100,000,000	75	628,240,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rg et	pendanaan (Rp)
Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil		Jumlah sampel Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman yang diawasi (lokasi)	Jumlah sampel Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman yang diawasi (lokasi)	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil (laporan)	12			12	257,800,000	12	200,000,000	12	70,440,000	12	100,000,000	12	628,240,000
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Prosentase Pengembangan Prasarana yang berfungsi dengan baik (%)	Prosentase Pengembangan Prasarana yang berfungsi dengan baik (%)		50			50	29,553,000	50	542,900,000	75	233,727,000	100	3,420,000,000	100	4,226,280,000
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian		Prosentase pengembangan prasarana pertanian (%)	Prosentase pengembangan prasarana pertanian (%)		50			50	29,653,000	-	-	75	16,138,000	100	320,000,000	100	365,791,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1 050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rg et	pendanaan (Rp)
Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B		Penyusunan Laporan/Peta/ Peraturan Daerah tentang LP2B, KP2B dan LCP2B Kota Madiun (dokumen)	Penyusunan Laporan/Peta / Peraturan Daerah tentang LP2B, KP2B dan LCP2B Kota Madiun (dokumen)	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B (dokumen)	1			1	29,653,000	0	0	0	0	1	300,000,000	1	329,653,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian (laporan)	1			1	29,653,000	0	0	1	16,138,000	1	20,000,000	1	65,791,000
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian			Prosentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/ Dipelihara (%)		25			0	-	25	542,900,000	25	217,589,000	25	3,100,000,000	25	3,860,489,000
Sub Kegiatan Pembangunan , Rehabilitasi dan				Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang	0			0	-	0	-	0	0	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)				Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2 / 2021		Tahun 3 / 2022		Tahun 4 / 2023		Tahun 5 / 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
	2020	2021	2022	Kepmendagr 1 050-5889 Tahun 2021		Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Ta rg et	pendanaan (Rp)
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (unit)													
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			Jumlah JUT Dibangun/ Direhabilitasi / dipelihara (unit)	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	0			0	-	1	542,900,000	1	52,815,000	1	1,500,000,000	1	2,095,715,000
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan				Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	0			0	-	1	-	1	8,009,000	1	300,000,000	1	308,009,000
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	0			0	-	0	-	2	156,765,000	2	300,000,000	2	456,765,000



WALIKOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TOTOK SUGIARTO ,SH., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**

Jabatan : **PI WALIKOTA MADIUN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.



TOTOK SUGIARTO, SH., M.Si
NIP 197009011996031008

PERJANTIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.48 Skor
2.	Meningkatnya Akses Pangan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95.8 Skor
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan Pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	1.35 Rasio
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	1.16 Rasio
5.	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio pendapatan Pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	1.221 Rasio

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.530.622.937
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	391.234.000
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	58.200.000
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	85.631.000
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	436.605.000
6.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	70.022.000
7.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	466.054.000
8.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.439.213.000
9.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.459.043.910
10.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	407.740.090
11.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	109.800.000
12.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	33.600.000
13.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.558.495.367
	Jumlah	Rp. 17.046.261.304



Pihak Kedua,

EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.



Madiun, 06 September 2024
Pihak Pertama,

TOTOK SUGIARTO, SH., M.Si
NIP 197009011996031008



WALI KOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Totok Sugiarto, SH., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Madiun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

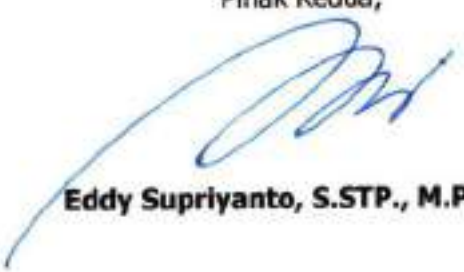
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

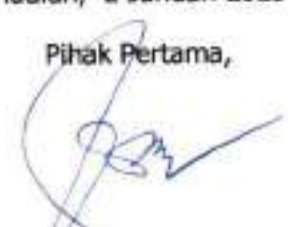
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,


Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.

Pihak Pertama,


Totok Sugiarto, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197009011996031008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,35
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,2
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,26
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,68

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.058.800.648	-
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 495.111.000	-
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 65.853.000	-
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 98.369.000	-
5.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 417.000.000	-
6.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp. 74.865.000	-
7.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 467.696.000	-
8.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.152.582.080	-
9.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 2.531.923.500	-
10.	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 337.603.000	-
11.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 150.000.000	-
12.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 33.600.000	-
13.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.960.470.000	-
J u m l a h		Rp. 15.843.873.228	

Madiun, 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA MADIUN

Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA MADIUN**

Totok Sugiarto, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197009011996031008



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Tirta Raya Nomor 15 Madiun Kode Pos 63129

Telepon (0351) 455855 Fax (0351) 455855

Email : dipertakotamadiun@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN
NOMOR : 520/ 90 /401.113/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KOMPETISI INOVASI "PECELPAKKASTAN"
(PELAYANAN CEPAT DAN LANGSUNG, PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN
PERTANIAN) DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun mengajukan Inovasi "PECELPAKKASTAN" (Pelayanan Cepat dan Langsung, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Pertanian) dalam Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) di Kota Madiun ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kompetisi Inovasi "PECELPAKKASTAN" (Pelayanan Cepat dan Langsung, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Pertanian) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
2. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik daerah Tahun 2023 ;
3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Nomor 520/73/401.113/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 tentang Penetapan Inovasi "PECELPAKKASTAN" (Pelayanan Cepat dan Langsung, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Pertanian) dalam Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) di Kota Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Inovasi "PECELPAKKASTAN" (Pelayanan Cepat dan Langsung, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Pertanian) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Inovasi "PECELPAKKASTAN" sebagaimana yang dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan kegiatan baik dari segi waktu pelaksanaan, penyusunan proposal, tenaga ahli dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ;
2. Mempersiapkan persyaratan yang diperlukan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ;
3. Melaksanakan seluruh rangkaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan ;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dan sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di **MADIUN**
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA MADIUN**



TOTOK SUGIARTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760901 199603 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun
Nomor : 520/ 90 /401.113/2023
Tanggal : 1 Maret 2023

**TIM PELAKSANA KOMPETISI INOVASI
"PECELPAKKASTAN" (PELAYANAN CEPAT DAN LANGSUNG, PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN DAN PERTANIAN)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN**

Pelindung : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun
Totok Sugiarto, SH,M,SI

Pengarah : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun
Arief Endro Poernomo, SPt, MT

Ketua : Kepala Bidang Pertanian
Wahyu Niken Febrianti, SP

Sekretaris : Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan
Drh. Margaretha Dian Wartiningdyah

Anggota :
1. Drh. Yeri Anisa
2. Drh. Lailatun Nafisah
3. Drh. Muhammad Sulthan Rasyid Rifai
4. Rachmayanti Nur Maulida, A. Md
5. Dini Wulandari
6. Muhammad Nadhif Atthariq, S. Pt

Ditetapkan : di Madiun
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA MADIUN**



TOTOK SUGIARTO, SH, M.Si
Rembina Utama Muda
NIP. 19700901 199603 1 008

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kota Madiun
Tahun 2024

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
												I		II		III		IV															
1				2		3		4		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%							
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)						
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8,065,687,937			1,076,938,553			1,891,036,154			1,770,868,901			2,907,430,871										
2	9	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor (A)	80.01			7,530,622,937	0		990,562,503	0		1,726,365,454	83.75		1,588,731,565	0		2,819,461,021	83.75		Rp7,125,120,543	105%	95%	A	21,509,418,104	100%	99%		
2	9	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	%	100			121,747,000	25		27,342,500	25		17,515,400	25		37,728,000	25		37,914,000	100		Rp120,499,900	100%	99%	100		366,816,550	100%	29%	
2	9	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	8			121,747,000	3		27,342,500	2		17,515,400	2		37,728,000	1		37,914,000	8		Rp120,499,900	100%	99%	48		366,816,550	100%	89%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100			4,759,106,937	25		770,374,717	25		1,151,059,597	25		1,000,061,195	25		1,458,986,132	100		Rp4,380,481,641	100%	92%	200		15,934,235,604	200%	27%	
2	9	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	27			4,759,106,937	26		770,374,717	26		1,151,059,597	26		1,000,061,195	27		1,458,986,132	27		Rp4,380,481,641	100%	92%	53		15,934,235,604	98%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100			74,985,800	25		6,240,000	25		12,224,000	25		20,083,000	25		35,944,500	100		Rp74,491,500	100%	99%	100		88,333,400	100%	87%	
2	9	1	2.05	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3			74,985,800	3		6,240,000	0		12,224,000	0		20,083,000	2		35,944,500	5		Rp74,491,500	167%	99%	8		88,333,400	133%	103%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100			1,119,177,500	25		144,062,004	25		206,901,670	25		322,462,280	25		438,040,810	100		Rp1,111,466,764	100%	99%	100		2,624,632,579	100%	48%	
2	9	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	19			767,156,500	4		109,067,200	5		156,721,750	5		242,500,400	5		252,968,300	19		Rp761,257,650	100%	99%	38		1,525,997,152	127%	105%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12			55,953,000	3		13,184,500	3		10,700,500	3		5,064,800	3		27,000,400	12		Rp55,950,200	100%	100%	26		79,290,100	108%	71%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12			296,068,000	3		21,810,304	3		39,479,420	3		74,897,080	3		158,072,110	12		Rp294,258,914	100%	99%	26		1,019,345,327	108%	137%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100			733,081,500	25		-	25		274,005,740	25		150,664,160	25		298,789,250	100		Rp723,459,150	100%	99%	100		1,004,590,400	100%	96%	
2	9	1	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1			275,785,500	0		-	1		267,891,000	1		2,300,000	0		3,337,500	2		Rp273,528,500	200%	99%	2		273,528,500	200%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1			117,060,000	0		-	0		6,114,740	1		110,265,160	0		-	1		Rp116,379,900	100%	99%	1		116,379,900	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8			340,236,000	0		-	0		0	2		38,099,000	76		295,451,750	78		Rp333,550,750	975%	98%	88		614,682,000	489%	82%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemeliharaan barang milik daerah yang layak digunakan	%	100			722,524,200	25		42,543,282	25		64,659,047	25		57,732,930	25		549,786,329	100		Rp714,721,588	100%	99%	100		1,490,809,571	100%	32%	
2	9	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35			147,411,100	6		21,691,067	7		21,676,757	8		32,741,080	15		65,423,310	36		Rp141,532,214	103%	96%	68		335,294,888	99%	103%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15			36,022,500	4		1,680,890	3		5,738,633	4		12,681,850	4		15,786,800	15		Rp35,888,173	100%	100%	36		-	120%	#VALUE!	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit/tahun	3			490,329,600	0		14,489,825	0		30,503,657	3		-	1		443,936,219	4		Rp488,929,701	133%	100%	5		927,350,160	167%	59%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	75			48,761,000	8		4,681,500	24		6,740,000	23		12,310,000	20		24,640,000	75		Rp48,371,500	100%	99%	148		178,022,590	74%	70%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV												
1					2		3		4		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 × 100%		14=6+12		15=14/5 × 100%	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Angka Kecukupan Energi	%	100		391,234,000	0	69,706,250	0	79,106,300	0	168,690,900	101.4	66,758,350	101.4	Rp384,261,800	101%	98%	198	2,798,270,717	198%	72%		
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	%	100		226,234,000	0	30,682,200	0	37,633,250	0	102,451,300	100	51,999,650	100	Rp222,766,400	100%	98%	206	936,099,465	206%	31%		
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Laporan	1		175,609,000	0	26,907,700	0	27,854,750	0	87,260,300	1	31,788,550	1	Rp173,811,300	100%	99%	2	887,144,365	100%	124%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	3	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	2		17,200,000	0	574,500	1	5,078,500	1	6,831,000	0	3,056,300	2	Rp15,540,300	100%	90%	2	15,540,300	100%	90%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	3	2.01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	4		33,425,000	0	3,200,000	0	4,700,000	0	8,360,000	4	17,154,800	4	Rp33,414,800	100%	100%	4	33,414,800	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	kcal/kapita	2000		165,000,000	0	39,024,050	0	41,473,050	0	66,239,600	2028	14,758,700	2028	Rp161,495,400	101.40%	98%	4128	1,862,171,252	197%	5%		
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1		43,700,000	0	-	0	35,273,050	0	1,100,000	1	4,085,200	1	Rp40,458,250	100%	93%	9	138,102,730	113%	71%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2		121,300,000	1	39,024,050	0	6,200,000	0	65,139,600	1	10,673,500	2	Rp121,037,150	100%	100%	4	1,724,068,522	67%	58%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	%	22		58,200,000	0	8,000,000	0	23,532,600	0	9,975,000	22	15,420,000	22	Rp56,927,600	100%	98%	22	89,401,300	100%	149%		
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Dokumen	1		58,200,000	0	8,000,000	0	23,532,600	0	9,975,000	1	15,420,000	1	Rp56,927,600	100%	98%	1	89,401,300	50%	95%		
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1		58,200,000	0	8,000,000	0	23,532,600	0	9,975,000	1	15,420,000	1	Rp56,927,600	100%	98%	3	89,401,300	75%	149%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar aman yang teruji	%	80		85,631,000	0	8,669,800	0	62,031,800	0	3,471,436	92.34	5,791,500	92.34	Rp79,964,536	115%	93%	190	#REF!	238%	#REF!		
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	lokasi	8		85,631,000	1	8,669,800	3	62,031,800	3	3,471,436	4	5,791,500	11	Rp79,964,536	138%	93%	27	#REF!	84%	#REF!		
2	9	5	2.01	7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1		60,656,000	1	856,500	0	49,799,000	0	1,554,336	0	3,324,000	1	Rp55,533,836	100%	92%	1	55,533,836	100%	92%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	5	2.01	9	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1		24,975,000	0	7,813,300	0	12,232,800	0	1,917,100	1	2,467,500	1	Rp24,430,700	100%	98%	1	24,430,700	100%	98%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					972,681,000		66,245,253		244,929,076		147,596,700		494,602,308		953,373,337								
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Ton	290		436,605,000	91.79	54,301,501	56.5	51,596,630	73	30,085,810	68.81	295,234,422	290.1	Rp431,218,363	100%	99%	570	804,840,055	67%	93%		
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	RTP	260		436,605,000	60	54,301,501	50	51,596,630	60	30,085,810	92	295,234,422	262	Rp431,218,363	101%	99%	262	804,840,055	52%	50%		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV											
1				2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	1	224,955,000	0	0	20,316,000	0	252,000	2	202,687,242	2	Rp223,255,242	200%	99%	2	223,255,242	200%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	155,800,000	0	21,475,501	0	25,168,130	0	21,521,710	6	84,295,180	6	Rp152,460,521	150%	98%	16	189,067,291	133%	98%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	120	55,850,000	120	32,826,000	0	6,112,500	0	8,564,100	0	8,000,000	120	Rp55,502,600	100%	99%	235	392,517,522	168%	58%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Ton	89	70,022,000	25.1	4,000,000	27	29,426,200	25	16,363,000	19.1	17,441,000	96.2	Rp67,230,200	108%	96%	189	139,489,120	71%	58%	
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/pemuliharaan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	435	70,022,000	100	4,000,000	100	29,426,200	100	16,363,000	140	17,441,000	440	Rp67,230,200	101%	96%	875	139,489,120	67%	28%	
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	70,022,000	0	4,000,000	0	29,426,200	1	16,363,000	1	17,441,000	2	Rp67,230,200	100%	96%	6	139,489,120	100%	58%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Makan ikan	Kg/Kapita/ta hun	16.5	466,054,000	0	7,943,752	0	163,906,246	0	101,147,890	20.46	181,926,886	20.46	Rp454,924,774	124%	98%	37	1,414,471,395	235%	327%	
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	orang	50	75,000,000	12	4,000,000	18	6,000,000	68	54,391,403	12	9,110,000	110	Rp73,501,403	220%	98%	243	659,900,754	122%	52%	
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	30	75,000,000	12	4,000,000	18	6,000,000	68	54,391,403	12	9,110,000	110	Rp73,501,403	367%	98%	140	659,900,754	233%	465%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	ton	26	391,054,000	9	3,943,752	9	157,906,246	9	46,756,487	9	172,816,886	36	Rp381,423,371	138%	98%	66	754,570,641	87%	132%	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasilitasi	Pelaku Usaha	14	391,054,000	0	3,943,752	0	157,906,246	27	46,756,487		172,816,886	27	Rp381,423,371	193%	98%	50	754,570,641	109%	260%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				8,007,892,367		306,589,500		2,468,159,200		921,606,074		3,572,221,898		7,268,576,672							
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektivitas sarana pertanian	%	65	2,439,213,000	0	35,873,000	30	1,732,782,300	25	199,900,000	15	450,695,183	70	Rp2,419,250,483	108%	99%	125	7,649,755,886	192%	82%	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	%	80	2,333,639,000	15	19,598,000	15	1,716,047,300	25	181,040,000	25	399,438,500	80	Rp2,316,123,800	100%	99%	155	7,003,390,624	194%	27%	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	410,800,000	0	10,850,000	0	16,350,000	0	181,040,000	1	190,910,000	1	Rp399,150,000	100%	97%	2	761,851,560	100%	160%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1,922,839,000	0	8,748,000	0	1,699,697,300	0	-	1	208,528,500	1	Rp1,916,973,800	100%	100%	2	6,241,539,064	50%	77%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV										
1				2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 × 100%		14=6+12		15=14/5 × 100%		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3	27	2	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	%	75	105,574,000	20	16,275,000	20	16,735,000	20	18,860,000	15	51,256,683	75	Rp103,126,683	100%	98%	150	646,365,262	200%	14%	
3	27	2	2.03	1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	12	105,574,000	3	16,275,000	3	16,735,000	3	18,860,000	3	51,256,683	12	Rp103,126,683	100%	98%	74	646,365,262	154%	85%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	%	100	1,459,043,910	0	87,535,000	0	164,062,925	30	177,050,600	70	969,634,700	100	Rp1,398,283,225	100%	96%	150	2,076,665,825	150%	54%	
3	27	3	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian	%	100	115,188,000	0	-	0	1,975,000	30	34,427,100	70	55,761,000	100	Rp92,163,100	100%	80%	150	93,653,100	150%	132%	
3	27	3	2.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Laporan	1	114,613,000	0	-	0	1,975,000	0	34,427,100	1	55,761,000	1	Rp92,163,100	100%	80%	2	93,653,100	100%	134%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.01	16 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	575,000	0	-	0	0	0	0	0	-	0	Rp0	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang terbangun /rehabilitasi /dipelihara	%	25	1,343,855,910	10	87,535,000	0	162,087,925	0	142,623,500	15	913,873,700	25	Rp1,306,120,125	100%	97%	25	1,983,012,725	100%	34%	
3	27	3	2.02	3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	1,925,000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	Rp0	0%	0%	3	317,051,975	60%	10%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	1,296,919,910	0	77,075,000	0	154,727,925	0	127,465,000	2	904,226,500	2	Rp1,263,494,425	100%	97%	6	1,623,335,050	100%	215%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit/laporan	0	1,925,000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	Rp0	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				15 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	43,086,000	1	10,460,000	0	7,360,000	0	15,158,500	0	9,647,200	1	Rp42,625,700	100%	99%	1	42,625,700	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10	407,740,090	0	49,172,800	0	115,654,375	0	95,610,940	15	143,249,140	15	Rp403,687,255	150%	99%	25	#REF!	250%	#REF!	
3	27	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	%	80	316,000,090	10	25,000,000	20	77,271,475	20	84,212,940	30	126,521,890	80	Rp313,006,305	100%	99%	160	#REF!	200%	#REF!	
3	27	4	2.01	8 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	4	316,000,090	1	25,000,000	1	77,271,475	1	84,212,940	1	126,521,890	4	Rp313,006,305	100%	99%	4	313,006,305	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan yang direkomendasikan (izin medik veteriner dan paramedik veteriner)	jenis	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	Rp0	100%	0%	1	350,000	50%	0%	
3	27	4	2.03	2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	Rp0	0%	0%	1	350,000	50%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	%	80	91,740,000	25	24,172,800	25	38,382,900	25	11,398,000	25	16,727,250	100	Rp90,680,950	125%	99%	180	371,497,464	225%	23%	
3	27	4	2.04	2 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	10	91,740,000	3	24,172,800	3	38,382,900	3	11,398,000	3	16,727,250	12	Rp90,680,950	120%	99%	21	371,497,464	105%	95%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase lahan aman bencana pertanian	%	76	109,800,000	0	-	35	101,076,000	25	-	25	2,385,000	85	Rp103,461,000	112%	94%	157	546,582,595	207%	79%	
3	27	5	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	Ha/Tahun	2000	109,800,000	0	-	847.23	101,076,000	762.9	-	844.67	2,385,000	2454.75	Rp103,461,000	123%	94%	4205	546,582,595	74%	15%	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) PAK			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) PAK		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1				2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	50	109,800,000	26.72	-	10.15	101,076,000	5	-	17.03	2,385,000	58.9	Rp103,461,000	118%	94%	126	546,582,595	114%	79%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	%	15	33,600,000	0	-	0	-	0	4,478,100	15	7,591,000	15	Rp12,069,100	100%	36%	23	74,641,500	153%	40%	
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	jenis laporan	2	33,600,000	0	-	0	-	1	4,478,100	1	7,591,000	2	Rp12,069,100	100%	36%	3	74,641,500	50%	7%	
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen/laporan	2	33,600,000	0	-	0	0	1	4,478,100	1	7,591,000	2	Rp12,069,100	100%	36%	4	74,641,500	33%	40%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	%	40	3,558,495,367	0	134,008,700	15	354,583,600	15	444,566,434	15	1,998,666,875	45	Rp2,931,825,609	113%	82%	65	4,659,013,284	325%	1161%	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian terlatih	orang	400	3,558,495,367	0	134,008,700	257	354,583,600	171	444,566,434	121	1,998,666,875	549	Rp2,931,825,609	137%	82%	627	4,659,013,284	131%	730%	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	38	3,558,495,367	0	134,008,700	38	354,583,600	0	444,566,434		1,998,666,875	38	Rp2,931,825,609	100%	82%	76	4,659,013,284	100%	1161%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rata - Rata Capaian Kinerja																										
Rata - Rata Capaian Keuangan																										
TOTAL									17,046,261,304		1,449,773,306		4,604,124,430		2,840,071,675		6,974,255,077		15,868,224,488		93.09%					